



**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



Manajemen Resiko (Man - Risk) TAHUN 2026

Alamat



Jalan MT. Haryono, Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Kode Pos 75124

Kontak



dishub@samarindakota.go.id

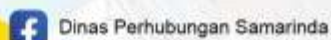
Website



dishub.samarindakota.go.id



Salam Perubahan





Manajemen Risiko (Man-Risk) Tahun 2026

Alamat



Jalan MT. Haryono, Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Kode Pos 75124

Kontak



dishub@samarindakota.go.id

Website



dishub.samarindakota.go.id



STRATEGIS
OPD

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
PENETAPAN KONTEKS TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
PERIODE RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

URUSAN PEMERINTAHAN	: Bidang Perhubungan
Visi Pemda	: 1. Samarinda maju, untuk kaltim maju
Misi Pemda	: 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Tujuan Strategis Pemda	: 3. Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas dengan indikator Indeks kota layak huni (Liveable City Index) dengan target sebesar pada Tahun 2029
Sasaran strategis dan indikator Kinerja Strategis Pemda	: 3.3 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dengan indikator Indeks kepuasan layanan infrastruktur dengan target sebesar pada tahun 2029
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD (Eselon II)	: 1. Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi dengan indikator rasio konektivitas dengan nilai sebesar 79,56 pada tahun 2029
Program Prioritas OPD	: Sasaran. Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi dengan indikator rasio konektivitas dengan nilai sebesar 79,56 pada tahun 2029
	: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan target 88,00 pada tahun 2029 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 88,48 pada tahun 2029
	: 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Indikator : 1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 1 (indeks) pada tahun 2029 2. Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target sebesar 65.00 % pada tahun 2029 3. Persentase Kendaraan Layak Uji dengan target sebesar 61.00% pada tahun 2029
	: 3. Program Pengelolaan Pelayaran dengan Indikator Konektivitas Sungai dengan target sebesar 0,86 rasio pada tahun 2029
Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	: Dinas Perhubungan
Penetapan konteks Risiko Strategis OPD (Dinas Perhubungan Kota Samarinda)	: Sasaran. Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi dengan Indikator Rasio Konektivitas dengan sebesar 100 pada Tahun 2029
	: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan target 88,00 pada tahun 2029 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 88,48 pada tahun 2029
	: 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Indikator : 1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 1 (indeks) pada tahun 2029 2. Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target sebesar 65.00 % pada tahun 2029 3. Persentase Kendaraan Layak Uji dengan target sebesar 61.00% pada tahun 2029
	: 3. Program Pengelolaan Pelayaran dengan Indikator Konektivitas Sungai dengan target sebesar 0,86 rasio pada tahun 2029

Mengetahui,
Wali Kota Samarinda

Samarinda, 06 Mei 2025

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda



DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS (ESELON II) - URUSAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			No	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas	Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dengan target sebesar pada tahun 2029									
1	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas dengan target sebesar 1 rasio pada tahun 2029	1	Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	RSO.29.15.100.05.01	Kepala Dinas	<p>Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga dalam sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan</p> <p>Kurangnya ketersediaan kantong parkir dan gedung parkir serta belum adanya penerapan teknologi tepat guna sehingga aktivitas parkir tepi jalan cenderung memicu kemacetan</p> <p>SRP (Satuan Ruang Parkir) yang di gunakan untuk kegiatan usaha/PKL</p>	<p>Internal</p> <p>Internal & eksternal</p> <p>Internal</p>	C	<p>Meningkatnya titik kemacetan lalu lintas jalan</p> <p>Maraknya Parkir Tepi Jalan Umum yang menyebabkan hambatan lalu lintas</p> <p>Ruang parkir tepi jalan umum berkurang sehingga menyebabkan parkir ke badan jalan yang melebihi ruang yang tersedia sehingga menghambat jalur lalu lintas</p>	Masyarakat dan OPD pelaksana

2	Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	RSO.29.15.100.05.02	Kepala Dinas	Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan	Internal	C	Meningkatnya kecelakaan dan kejahatan di jalan	Masyarakat dan OPD pelaksana
				Belum optimalnya pemeliharaan perlengkapan jalan				
3	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	RSO.29.15.100.05.03	Kepala Dinas	Fungsi ruas jalan yang berstatus Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan manajemen lalu lintas	Internal	C	1. Lintasan angkutan barang kondisi eksisting masih melintasi daerah permukiman (jl. mas mansyur, jl jakarta) belum adanya penghubung jalan lingkaran ring road ke jembatan mahakam ulu. 2. Terpasangnya rambu kelas jalan III di ruas jalan provinsi yang merupakan lintasan kend petik kemas yang berdimensi lebih dari 2,1 m yg tidak sesuai kelas jalan III	Masyarakat dan OPD pelaksana
				Masih banyaknya pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan.	Internal		Tundaan lalu lintas dikarenakan adanya parkir kendaraan yg parkir tepi jalan disebabkan halaman parkir di toko digunakan untuk usaha	

				Belum ada langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan.	Internal		Kerusakan jalan dikarenakan Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan yg melebihi kelas jalan yg diijinkan, kemacetan dikarenakan kendaraan besar berdimensi besar yang berbaaur dengan kendaraan lainnya	
4	Menurunnya Kinerja Angkutan umum Di kota Samarinda	RSO.29.15.100.05.04	Kepala Dinas	<p>Sarana angkutan umum kurang layak, rata-rata usia kendaraan diatas 15 tahun ;</p> <p>Kepastian waktu tunggu kendaraan, waktu perjalanan , dan rute yang dilewati tidak bisa di prediksi sehingga banyak masyarakat yang kurang berminat menggunakan angkutan umum</p> <p>Belum semua jaringan jalan dan daerah pemukiman/ perumahan terjangkau trayek angkutan menuju lokasi aktivitas masyarakat (kantor, sekolah, pusat perbelanjaan dll)</p>	Internal	C	<p>Tidak tercapainya target rasio konektivitas</p> <p>Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang menyebabkan peningkatan kendaraan pribadi sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan</p> <p>Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan moda sarana transportasi sehingga menyebabkan tingkat kemacetan di jalan raya.</p>	Masyarakat dan OPD pelaksana

			5	Menurunnya kewajiban melakukan uji berkala kendaraan wajib uji di kota Samarinda	RSO.29.15.100.05.05	Kepala Dinas	Masih banyak beroperasinya kendaraan kategori Over Dimensi dan Over Load sehingga tidak mau mengujikan kendaraanya pada UPTD PKB	Internal	C	Meningkatnya potensi/risiko kecelakaan lalu lintas	Masyarakat dan OPD pelaksana
							Pengawasan dan penindakan bagi pelanggar tidak bisa dilakukan, karena kewenangan petugas terbatas (PPNS)			Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ketegasan Pemerintah	
			6	Banyaknya bangunan gedung kantor Pelabuhan/ Dermaga yang belum memadai sebagai penunjang fasilitas umum pada pengguna transportasi jasa diperairan sungai Mahakam	RSO.29.15.100.05.06	Kepala Dinas	Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan/ Dermaga yang dikelola Dinas	Internal	C	Tidak terlayani kapal penumpang dan barang	Masyarakat dan OPD pelaksana

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)


Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko


Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi* (

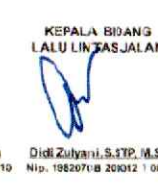
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

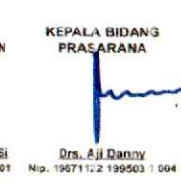
KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO IN HEREN


Risiko	KEPALA DINAS		SEKRETARIS		KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN		KEPALA BIDANG PRASARANA		KEPALA BIDANG KESELAMATAN		KEPALA ANGKUTAN		KEPALA UPTD FKB		KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM		KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN		Jumlah		Ri te-rate		Skala Risiko 100 Map
	HMT Manulu, S.SIT, M.Sc		Drs. H. Siami Misnam		Didi Zulyani, S.STP, M.Si		Drs. Aji Danny		V. Hari Prabowo, A.Td, MT		Ayatullah Khumsini, S.STP, M.Si		Redy Haris Senjaya, ST, MM		Muhammad Fauzi, SE, MM		Facilan, SE		Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan					
Pengelolaan perpajakan belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	36	45	4	5	23
Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	4	5	3	5	3	45	37	5	4	24
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	3	4	3	4	3	4	3	5	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	27	37	3	4	16
Menurunnya Kinerja Angkutan umum Di kota Samarinda	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	45	41	5	5	25
Menurunnya kewajiban melakukan uji berkala kendaraan wajib uji di kota Samarinda	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	44	5	5	25
Banyaknya bangunan gedung kantor Pelabuhan/ Dermaga yang belum memadai sebagai penunjang fasilitas umum pada pengguna transportasi jasa perairan sungai Mahakam	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	45	41	5	5	25	

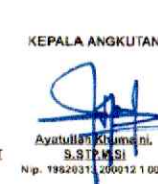

KEPALA DINAS
 HMT Manulu, S.SIT, M.Sc
 Nip. 19770328 200012 1 001



SEKRETARIS
 Drs. H. Siami Misnam
 Nip. 19681212 196803 1 010

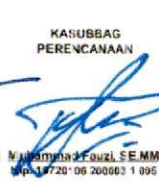

KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN
 Didi Zulyani, S.STP, M.Si
 Nip. 19820718 200312 1 001

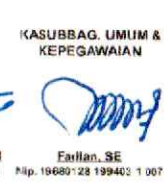

KEPALA BIDANG PRASARANA
 Drs. Aji Danny
 Nip. 19671122 199503 1 004


KEPALA BIDANG KESELAMATAN
 V. Hari Prabowo, A.Td, MT
 Nip. 197001 199403 1 003


KEPALA ANGKUTAN
 Ayatullah Khumsini, S.STP, M.Si
 Nip. 19820313 200012 1 001


KEPALA UPTD FKB
 Redy Haris Senjaya, ST, MM
 Nip. 19900221 201101 1 003


KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
 Muhammad Fauzi, SE, MM
 Nip. 19720106 200503 1 005


KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
 Facilan, SE
 Nip. 19680128 199402 1 007

Kriteria Kemungkinan

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (serikat 51 - 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (serikat 31 - 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/serik (serikat 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (serikat 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Kriteria Dampak

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Kemungkinan	Kisaran	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kemungkinan sangat besar	kegiatan terganggu, operasi tidak tercapai	negatif, kesadaran luas di berbagai media	pelanggaran serius, terancam sanksi
Tinggi	4	Kemungkinan besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	Kemungkinan cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	Kemungkinan kecil/kurang material	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi administratif
Sangat Rendah	1	Kemungkinan kecil, tidak material	kegiatan terhambat, tidak terganggu	netral, pemberitaan negatif, terancam tidak material	pelanggaran tidak material

Matriks Skala Risiko

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama OPD	: Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Tahun Penilaian	: 2026
Tujuan Strategis	: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dengan indikator Indeks kepuasan layanan infrastruktur dengan target sebesar pada tahun 2029
Urusan Pemerintahan	: Perhubungan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD						
1	Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	RSO.29.15.100.05.01			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	2025 s/d 2027
2	Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	RSO.29.15.100.05.02			Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	2025 s/d 2029
					Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota		

					Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan		
					Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan		
3	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	RSO.29.15.100.05.03			Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	2025 s/d 2029
					Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		
					Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		
					Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		
4	Menurunnya Kinerja Angkutan umum Di kota Samarinda	RSO.29.15.100.05.04			Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	2026-2030

					Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	
5	Menurunnya kewajiban melakukan uji berkala kendaraan wajib uji di kota Samarinda	RSO.29.15.100.05.05			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Kepala Dinas
					Sosialisasi operasional pengujian standar prosedur berkala kendaraan bermotor	
					Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	
					Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	
						2025 s/d 2029

KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO RESI DUAL

Risiko	KEPALA DINAS		SEKRETARIS		KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN		KEPALA BIDANG PRASARANA		KEPALA BIDANG KESELAMATAN		KEPALA BIDANG ANGKUTAN		KEPALA UPTD PKS		KASUBAG. PERENCANAAN PROGRAM		KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN		Jumlah		Rata-rata		Skala Risiko HI Map
	HMT Manal, S.SiTM.Sc		Drs. H. Siami Mianam		Didi Zulyari, S.STP.M.Si		Drs. Aji Denny		V. Heri Prabowo, A.Td.MT		Ayatullah Khumaili, S.STP.M.Si		Redy Hari Senjaya, STMM		Muhammad Fauzi, SE, MM		Fadlan, SE		Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	36	45	4	5	23
Ketersediaan pertangkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	4	5	3	5	3	45	37	5	4	24
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	3	4	3	4	3	4	3	5	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	27	37	3	4	16
Menurunnya Kinerja Angkutan umum Di kota Samarinda	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	45	41	5	5	25
Menurunnya kewajiban melakukan uji berkala kendaraan wajib uji di kota Samarinda	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	44	5	5	25
Banyaknya bangunan gedung kanor/ Petalubuhan/ Dermaga yang belum memadai sebagai penunjang fasilitas umum pada pengguna transportasi jasa perairan sungai Mahakam	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	45	41	5	5	25	











KEPALA DINAS SEKRETARIS KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN KEPALA BIDANG PRASARANA KEPALA BIDANG KESELAMATAN KEPALA BIDANG ANGKUTAN KEPALA UPTD PKS KASUBAG. PERENCANAAN PROGRAM KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

HMT Manal, S.SiTM.Sc Drs. H. Siami Mianam Didi Zulyari, S.STP.M.Si Drs. Aji Denny V. Heri Prabowo, A.Td.MT Ayatullah Khumaili, S.STP.M.Si Redy Hari Senjaya, STMM Muhammad Fauzi, SE, MM Fadlan, SE

Nip. 19770321-200012-1-001 Nip. 19881212-198803-1-010 Nip. 19820704-200012-1-001 Nip. 19671122-199403-1-004 Nip. 197006-199446-1-003 Nip. 194203-3-200012-1-001 Nip. 19800221-201101-1-003 Nip. 19720106-200603-1-005 Nip. 19880128-199403-1-007

Kriteria Kemungkinan

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 - 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 - 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Kriteria Dampak

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Kemungkinan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kemungkinan sangat besar	kegiatan terganggu, reputasi tidak tercapai	negatif, terdapat isu di masyarakat media	pelanggaran di semua peraturan
Tinggi	4	Kemungkinan besar	kegiatan sebagian terganggu, kinerja efektif	negatif, terdapat isu di beberapa media nasional/ lokal	pelanggaran di semua peraturan
Sedang	3	Kemungkinan cukup besar	kegiatan terganggu, kinerja efektif	negatif, terdapat isu di beberapa media lokal	pelanggaran di semua peraturan
Rendah	2	Kemungkinan kecil, kadang material	kegiatan terganggu, kinerja efektif	negatif, terdapat isu di beberapa media	pelanggaran di semua peraturan
Sangat Rendah	1	Kemungkinan kecil, tidak material	kegiatan terganggu	ada pemberitaan negatif, masalah tidak material	tidak material

Matriks Skala Risiko

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar	Sangat Besar	
Tingkat Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Unit Pemilik Risiko : Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 Tahun : 2026
 Selera Risiko Pemilik Risiko : Selera Risiko Kota Samarinda dari 16-25

No	Pernyataan Risiko	Skor Nilai Residual Risk setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
a	b	c	d	e
1	Risiko Strategi OPD			
1	Menurunnya Kinerja Angkutan umum Di kota Samarinda	5	5	25
2	Menurunnya kewajiban melakukan uji berkala kendaraan wajib uji di kota Samarinda	5	5	25
3	Banyaknya bangunan gedung kantor Pelabuhan/ Dermaga yang belum memadai sebagai penunjang fasilitas umum pada pengguna transportasi jasa diperairan sungai Mahakam	5	5	25
4	Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	4	5	24
5	Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	5	4	23
6	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	4	3	16

Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
6-10 (Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
11-15 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
16-20 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
21-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)

(Risk Appetite Pemerintah Kota Samarinda)

**Keterangan :**

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Pernyataan Risiko
- Kolom c diisi skor dampak
- Kolom d diisi dengan skor kemungkinan
- Kolom e Diisi dengan level risiko/skala risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 - 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 - 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/ jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian kecil/ kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pembertahanan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, tidak material	ada hambatan kegiatan, namun material tertangani	ada pembertahanan, negatif, namun tidak material	Tidak material

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

2	Menurunnya kewajiban melakukan wajib uji berkala angkutan umum di kota Samarinda	Masih banyak beroperasinya kendaraan kategori Over Dimensi dan Over Load sehingga tidak mau mengujikan kendaraanya pada UPTD PKB	Ditangani	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	Kepala Dinas		5	1	9
		Pengawasan Dan penindakan Bagi Pelanggar Tidak Bisa Dilakukan, Karena Kewenangan Petugas Terbatas (PPNS)		Sosialisasi oerasional pengujian standar prosedur berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya					
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar					
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor					
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					
3	Banyaknya bangunan gedung kantor pelabuhan/ dermaga yang belum memadai sebagai penunjang fasilitas umum pada pengguna transportasi jasa diperairan sungai Mahakam	Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan/ Dermaga yang diketola Dinas	Ditangani	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kepala Dinas		5	1	9

				Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang terbangun					
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara					
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia					
4	Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan	Ditangani	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	Kepala Dinas		4	1	6
		Belum optimalnya pemeliharaan perlengkapan jalan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia					
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara					
5	Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga dalam sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan	Ditangani	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	2025 s/d 2027	5	1	9

		Kurangnya ketersediaan kantong parkir dan gedung parkir serta belum adanya penerapan teknologi tepat guna sehingga aktivitas parkir tepi jalan cenderung memicu kemacetan								
		SRP (Satuan Ruang Parkir) yang di gunakan untuk kegiatan usaha/PKL								
6	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan nasional dan jalan Provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan manajemen lalu lintas	Ditangani	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	2025 s/d 2029	4	1	6
		Masih banyaknya pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan.		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
		Belum ada langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan.		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					

Skala Nilai Risiko

Kolom b diisi dengan pernyataan risiko

Kolom c diisi dengan respon risiko

Kolom d diisi dengan respon risiko

Kolom e diisi dengan rencana kegiatan pengendalian

Kolom f diisi dengan indikator keluaran (contoh Dokumen, SK, SOP dsb)

Kolom g diisi dengan Penanggung Jawab

Kolom h diisi dengan Target Waktu (Bulanan, Triwulan, Semester)

Kolom i diisi dengan Harapan Kemungkinan setelah ada Pengendalian / RTP

Kolom j diisi dengan Harapan Dampak setelah ada Pengendalian / RTP

Kolom k diisi dengan Harapan Level Risiko setelah ada Pengendalian / RTP

OPERASIONAL
OPD

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
PENETAPAN KONTEKS TUJUAN DAN SASARAN OPERASIONAL
PERIODE RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026**

URUSAN PEMERINTAHAN	Bidang Perhubungan
Visi Pemda	1 Samarinda maju untuk kaltim maju
Misi Pemda	3 Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Tujuan Strategis Pemda	3 Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas dengan indikator Indeks kota layak huni (Liveable City Index) dengan target sebesar pada tahun 2026
Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Strategis Pemda	3.3 Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dengan target sebesar pada tahun 2026
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD (Eselon II)	1. Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi dengan Indikator Rasio Konektivitas dengan nilai sebesar 42.97 pada tahun 2026
	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota dengan indikator :</p> <p>1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan target 82.00 pada tahun 2026</p> <p>2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 87,68 pada tahun 2026</p>
	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator :</p> <p>2. 1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 0,31 (indeks) pada tahun 2026</p> <p>2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target sebesar 45.00% pada tahun 2026</p> <p>3. Persentase Kendaraan Layak Uji dengan target sebesar 55.00% pada tahun 2026</p>
	<p>3. Program Pengelolaan Pelayaran dengan Indikator : Konektivitas Sungai dengan target sebesar 0.71 rasio pada tahun 2026</p>
	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator :</p> <p>1. 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan target 82,00 pada tahun 2026</p> <p>2. 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 87,68 pada tahun 2026</p>
	<p>1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP dengan target sebesar 100% pada tahun 2026</p>
	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Indikator :</p> <p>2. 1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 0,31 (indeks) pada tahun 2026</p> <p>2. 2. Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target sebesar 45.00% pada tahun 2026</p> <p>3. 3. Persentase Kendaraan Layak Uji dengan target sebesar 55.00% pada tahun 2026</p>
	<p>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota dengan indikator</p> <p>Jumlah perlengkapan jalan tersedia dengan target 7 unit pada tahun 2026</p>
Kegiatan Prioritas	<p>2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan indikator</p> <p>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan target sebesar 4 laporan pada tahun 2026</p>
	<p>3. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan indikator</p> <p>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dengan target sebesar 1 laporan pada tahun 2026</p>

	<p>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan</p> <p>4. indikator Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia dengan target sebesar 15 unit pada tahun 2026</p>
	<p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator</p> <p>5. Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan dengan target sebesar 18.500 unit pada tahun 2026</p>
	<p>3 Program Pengelolaan Pelayaran dengan Indikator :</p> <p>Konektivitas Sungai dengan target sebesar 0,71 rasio pada tahun 2026</p>
	<p>1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dengan indikator</p> <p>Presentase ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas Dermaga yang didukung SDM sesuai kapabilitas</p>
Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Sekretariat
	Bidang Lalu Lintas Jalan
	Bidang Prasarana
	Bidang Keselamatan
	Bidang Angkutan
	UPTD PKB
Penetapan konteks Risiko Strategis Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Prasarana, Bidang Keselamatan, Bidang Angkutan, UPTD PKB	<p>1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator :</p> <p>1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan target 82,00 pada tahun 2026</p> <p>2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 87,68 pada tahun 2026</p>
	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator</p> <p>1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP dengan target sebesar 100% pada tahun 2026</p>
	<p>2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Indikator :</p> <p>1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 0,31 (indeks) pada tahun 2026</p> <p>2. Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target sebesar 45.00% pada tahun 2026</p> <p>3. Persentase Kendaraan Layak Uji dengan target sebesar 55.00% pada tahun 2026</p>
	<p>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota dengan</p> <p>1. indikator Jumlah perlengkapan jalan tersedia dengan target 7 unit pada tahun 2026</p>
	<p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan indikator</p> <p>2. Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan target sebesar 4 laporan pada tahun 2026</p>
	<p>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan indikator</p> <p>3. Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dengan target sebesar 1 laporan pada tahun 2026</p>
	<p>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan</p> <p>4. indikator Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia dengan target sebesar 15 unit pada tahun 2026</p>
	<p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator</p> <p>5. Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan dengan target sebesar 18.500 unit pada tahun 2026</p>

	Program Pengelolaan Pelayaran dengan Indikator : 3 Konektivitas Angkutan Sungai dengan target sebesar 0.71 pada tahun 2026
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dengan indikator : 1. Presentase ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas Dermaga yang didukung SDM sesuai kapabilitas

Samarinda, 06 Mei 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Samarinda

HMT MANALU, S.Si, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001



Sekretaris
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Drs. H. Siami. Minam
NIP. 19681212 198803 1 010

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

DIDI ZULYANI, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200012 1 001

Kepala Bidang Prasarana
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Drs. Aji Danny
Nip. 19671122 199503 1 004

Kepala Bidang Keselamatan
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

V. HARI PRABOWO, ATD, MT
NIP. 19700620 199403 1 003

Kepala Bidang Angkutan
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si
NIP. 19820313 200012 1 001

Kepala UPTD PKB
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

REDY HARIE SENJAYA, ST,MM
NIP. 19800221 201101 1 003

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL (ESELON III/IV) - URUSAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2026

No	Tujuan/Sasaran Operasional OPD	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			No	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan target 82,00 pada tahun 2026									
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 87,68 pada tahun 2026									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP dengan target sebesar 100% pada tahun 2026	1	Dokumen Perencanaan, Dokumen penganggaran, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah tidak memadai	ROO.26.15.100.05.01	Sekretariat	Kurang koordinasi antar OPD dengan Pihak Pemangku	Eksternal	UC	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tidak sesuai SOP dengan target sebesar 100% pada tahun 2026	OPD
							Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah masih belum maksimal	Internal	C	Capaian kinerja tidak terukur secara berkala (per tri wulan)	OPD
B Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 0,31 (indeks) pada tahun 2026 2. Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target sebesar 45,00% pada tahun 2026 3. Persentase Kendaraan Layak Uji dengan target sebesar 55,00% pada tahun 2026									
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target sebesar 45,00% pada tahun 2026	2	Belum terselenggaranya penyediaan perlengkapan jalan	ROO.26.15.100.05.02	Kepala Bidang Prasarana	Perlengkapan jalan tidak berfungsi dengan baik (LPJU) padam, traffic light padam, dll	Internal	C	Tidak terpenuhinya jumlah perlengkapan jalan di jalan kota Samarinda	Masyarakat pengguna jalan
		Jumlah perlengkapan jalan tersedia dengan target 7 unit pada tahun 2026					Pencurian komponen perlengkapan jalan	Eksternal	UC		
							Faktor alam, gagal produk dan umur teknis perlengkapan jalan membuat perlengkapan jalan tidak berfungsi dengan baik	Eksternal	UC		
							Kurangnya kompetensi SDM Pelaksana / Teknisi lapangan	Internal	C		

3	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 0.31 (indeks) pada tahun 2026	3	Belum optimalnya penataan parkir	ROO.26.15.100.05.03	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Kualitas SDM dan kesejahteraan juru parkir masih cukup rendah	Internal	C	PAD tidak Tercapai	Masyarakat dan OPD Pelaksana
		Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan target sebesar laporan pada tahun 2026					Penarikan retribusi parkir masih menggunakan cara manual	Internal	C		
4	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 0.31 (indeks) pada tahun 2026	4	Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan bertambahnya angka kecelakaan	ROO.26.15.100.05.04	Kepala Bidang Keselamatan	Kurangnya penegakan hukum yang berefek jera kepada pelanggar	Internal	C	Mengakibatkan pelanggaran yang berulang dan terus menerus, angka kecelakaan terus meningkat, kurangnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah,	Masyarakat pengguna jalan
		Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dengan target sebesar 1 laporan pada tahun 2026					Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas memahami rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	Internal	C	Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas	
							Kurangnya sarana dan prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan yang ada	Internal	C	Menimbulkan potensi kecelakaan, kemacetan, penyalahgunaan fasilitas umum	
5	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1. Konektivitas Darat dengan target sebesar 0.31 (indeks) pada tahun 2026	5	Belum tersedianya angkutan umum massal	ROO.26.15.100.05.05	Kepala Bidang Angkutan	Anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan pengajuan anggaran	Internal	C	Target konektivitas darat tidak tercapai	Masyarakat dan OPD Pelaksana
		Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia dengan target sebesar 15 unit pada tahun 2026									
6	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3. Persentase Kendaraan Layak Uji dengan target sebesar 55.00% pada tahun 2026	6	Ketidaktaan pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	ROO.26.15.100.05.06	Kepala UPTD PKB	Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Internal	C	Mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah	Masyarakat pengguna jalan
		Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan dengan target sebesar 18.500 unit pada tahun 2026								Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan tidak sesuai target	
C Program pengelolaan Pelayaran											
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai	Konektivitas Sungai dengan target sebesar 0.71 rasio pada tahun 2026									
7	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas Dermaga yang didukung SDM sesuai kapabilitas	7	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi mengenai angkutan sungai dan danau	ROO.26.15.100.05.07	Kepala Bidang Angkutan	Kurangnya SDM yang pernah diklat / bintek mengenai angkutan sungai dan danau	Internal	C	Pelayanan bidang transportasi sungai kurang maksimal	Masyarakat dan OPD pelaksana
										Pengelolaan Operasional Dermaga Belum Optimal	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RRF,MD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab limbunya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO IN HEREN

Risiko	SEKRETARIS		KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN		KEPALA BIDANG PRASARANA		KEPALA BIDANG KESELAMATAN		KEPALA BIDANG ANGKUTAN		KEPALA UPTD PKB		KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM		KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN		Jumlah		Rata-rata		Skala Risiko Hit Map
	Drs. H. Siami Misnam		Didi Zulyani, S.STP, M.Si		Drs. Aji Danny		V. Hari Prabowo, A.Td.MT		Ayatullah Khumaini, S.STP.M.Si		Redy Harie Senjaya,ST,MM		Muhammad Fauzi, SE, MM		Fadlan, SE		Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
Dokumen Perencanaan, Dokumen penganggaran, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah tidak memadai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	24	26	3	3	14	
Belum terfasilitasinya penyediaan perlengkapan jalan	5	3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	40	33	5	4	24
Belum optimalnya penataan parkir	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	32	36	4	5	23
Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan bertambahnya angka kecelakaan	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	4	40	33	5	4	24
Belum tersedianya angkutan umum massal	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	32	33	4	4	19
Ketidak taatan pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	5	3	5	3	5	5	5	3	5	3	5	5	5	3	5	5	40	30	5	4	24
Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi mengenai angkutan sungai dan danau	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	24	24	3	3	14










Drs. H. Siami Misnam Nip. 19681212 198803 1 010 Nip. 19820708 200012 1 001 Nip. 19671122 199503 1 004 Nip. 197006 199403 1 003 Nip. 19820313 200012 1 001 Nip. 19800221 201101 1 003 Nip. 19720106 200003 1 005 Nip. 19680128 199403 1 007

Kriteria Dampak

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Dampak pada terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering sebesar 51 - 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang sebesar 31 - 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun

Kriteria Kemungkinan

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Kemungkinan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kemungkinan sangat besar	kegiatan terganggu, bahkan tidak beroperasi	negatif, terdapat luas di berbagai media	pelanggaran di sektor terkait
Tinggi	4	Kemungkinan besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran di sektor terkait
Sedang	3	Kemungkinan cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran di sektor terkait
Rendah	2	Kemungkinan kecil/kurang	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran di sektor terkait
Sangat Rendah	1	Kemungkinan kecil	kegiatan tidak terganggu	netral	Tidak material

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak					
		1	2	3	4	5	
Tingkat Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20
				Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama OPD : Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dengan target sebesar pada tahun 2026
 Urusan Pemerintahan : Perhubungan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Operasional OPD						
1	Dokumen Perencanaan, Dokumen penganggaran, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah tidak memadai	ROO.26.15.100.05.01			Membuat target dan pengukuran rencana aksi per Triwulan	Sekretariat	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Belanja makan minum rapat evaluasi capaian kinerja		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Cetak Dokumen capaian kinerja per triwulan		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4

2	Belum terfasilitasinya penyediaan perlengkapan jalan	ROO.26.15.100.05.02			Pengadaan dan pengamanan perlengkapan jalan : 1. Pengadaan LPJU 2. Pengadaan Rambu - rambu 3. Pengadaan Marka 4. Pengadaan ZOSS 5. Koordinasi Pengawasan	Kepala Bidang Prasarana, Kepala Seksi Prasarana Jalan	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Pengadaan / Pemasangan CCTV		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Pemeliharaan perlengkapan jalan : 1. Pemeliharaan LPJU 2. Pemeliharaan Rambu - rambu 3. Pemeliharaan Marka 4. Pemeliharaan ZOSS		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Pelaksanaan Diklat/Bimtek K3		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
3	Belum optimalnya penataan parkir	ROO.26.15.100.05.03			Belanja tenaga jasa kontrak pengatur tempat khusus parkir	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Jalan	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Belanja tenaga jasa kontrak juru pungut retribusi parkir		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4

					Belanja jasa konversi development integrasi uang elektronik		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Belanja pemeliharaan marka thermoplas		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Belanja aplikasi parkir		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Belanja plang informasi perparkiran		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
4	Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan bertambahnya angka kecelakaan	ROO.26.15.100.05.04			Melakukan Pembinaan pada sopir-sopir angkutan umum	Kepala Bidang Keselamatan	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas yang baik kepada anak usia dini hingga ke tingkat pelajar	Kepala Bidang Keselamatan	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Pengawasan kelengkapan dan fungsi fasilitas keselamatan jalan	Kepala Bidang Keselamatan	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
5	Belum tersedianya angkutan umum massal	ROO.26.15.100.05.05			Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	Kepala Bidang Angkutan	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4

					Sosialisasi Oto Samarinda		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Jasa survei pelaksanaan operasional Oto Samarinda		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Jasa pengawasan pelaksanaan operasional Oto Samarinda		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
6	Ketidak taatan pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	ROO.26.15.100.05.06			Belanja Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	Kepala UPTD PKB	TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Belanja pemeliharaan alat uji kendaraan		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
					Belanja pengadaan alat uji kendaraan		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
7	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi mengenai angkutan sungai dan danau	ROO.26.15.100.05.07			Cetak buku laporan	Kepala Bidang Angkutan	TW 4

					Belanja Diklat: 1. Diklat bidang kepelabuhanan dan pelayaran 2. Diklat inspektur marine 3. Diklat LLASDP		TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4
--	--	--	--	--	---	--	---------------------------

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO RESIDUAL

Risiko	SEKRETARIS		KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN		KEPALA BIDANG PRASARANA		KEPALA BIDANG KESELAMATAN		KEPALA BIDANG ANGKUTAN		KEPALA UPTD PKB		KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM		KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN		Jumlah		Rata-rata		Skala Risiko HI Map
	Drs. H. Siami Misnam		Didi Zutyani, S.STP, M.Si		Drs. Aji Danny		V. Hari Prabowo,A.Td,MT		Ayatullah Khumaini S.STP,M.Si		Redy Harie Senjaya, ST,MM		Muhammad Fauzi,SE,MM		Fadlan, SE		Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan					
Dokumen Perencanaan, Dokumen penganggaran, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah tidak memadai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	24	26	3	3	14	
Belum terfasilitasinya penataan parkir	5	3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	40	33	5	4	24
Belum optimalnya penataan parkir	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	32	36	4	5	23
Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan bertambahnya angka kecelakaan	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	4	40	33	5	4	24
Belum tersedianya angkutan umum massal	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	32	33	4	4	19
Ketidak taatan pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	5	3	5	3	5	5	5	3	5	3	5	5	5	3	5	5	40	30	5	4	24
Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi mengenai angkutan sungai dan danau	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	24	24	3	3	14

SEKRETARIS



Drs. H. Siami Misnam
Nip. 19661212 198803 1 010

KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN



Didi Zutyani, S.STP, M.Si
Nip. 19820706 200012 1 001

KEPALA BIDANG PRASARANA



Drs. Aji Danny
Nip. 19671122 199503 1 004

KEPALA BIDANG KESELAMATAN



V. Hari Prabowo, A.Td, MT
Nip. 197006 199403 1 003

KEPALA BIDANG ANGKUTAN



Ayatullah Khumaini, S.STP, M.Si
Nip. 19820313 200012 1 001

KEPALA UPTD PKB




Redy Harie Senjaya, ST, MM
Nip. 19800221 201101 1 003

KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM



Muhammad Fauzi, SE, MM
Nip. 19720106 200003 1 005

KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN



Fadlan, SE
Nip. 19680128 199403 1 007

Kriteria Dampak

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Dampak pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering sebesar 51 - 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang sebesar 31 - 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Kriteria Kemungkinan

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Kelangkaan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kemungkinan sangat besar	kegiatan terganggu, bahkan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran di semua tingkat sanksi
Tinggi	4	Kemungkinan besar	kegiatan sangat terganggu, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran di semua tingkat sanksi
Sedang	3	Kemungkinan cukup besar	kegiatan terganggu, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran di semua tingkat sanksi
Rendah	2	Kemungkinan kecil/kurang material	kegiatan terganggu, kurang efektif	negatif, terbatas pada pemberitaan	pelanggaran di semua tingkat sanksi
Sangat Rendah	1	Kemungkinan tidak material	kegiatan terganggu	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Unit Pemilik Risiko : Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 Tahun : 2026
 Selera Risiko Pemilik Risiko : Selera Risiko Kota Samarinda dari 14-24

No	Pernyataan Risiko	Skor Nilai Residual Risk setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
a	b	c	d	e
II Risiko Oprasional OPD				
1	Belum terfasilitasinya penyediaan perlengkapan jalan	4	5	24
2	Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan bertambahnya angka kecelakaan	4	5	24
3	Ketidak taatan pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	4	5	24
4	Belum optimalnya penataan parkir	5	4	23
5	Belum tersedianya angkutan umum massal	4	4	19
6	Dokumen Perencanaan, Dokumen penganggaran, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah tidak memadai	3	3	14
7	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi mengenai angkutan sungai dan danau	3	3	14

Keterangan :
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Pernyataan Risiko
 Kolom c diisi skor dampak
 Kolom e diisi dengan level risiko/skala risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
6-10 (Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
11-15 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
16-20 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
21-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 - 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 - 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitahuan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, tidak material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

No	Pernyataan Risiko	Pernyataan Penyebab	Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian	Indikator Keluaran	Penanggung jawab	Target Waktu	Risiko yang Direspon		
								Kemungkinan	Dampak	Level Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
II	Risiko Operasional OPD									
1	Belum terfasilitasinya penyediaan perlengkapan jalan	Perlengkapan jalan tidak berfungsi dengan baik (LPJU) padam, traffic light padam, dll	Preventif (Mencegah)	Pengadaan dan pengamanan perlengkapan jalan : 1. Pengadaan LPJU 2. Pengadaan Rambu - rambu 3. Pengadaan Marka 4. Pengadaan ZOSS 5. Koordinasi Pengawasan	Jumlah Perlengkapan jalan tersedia dan berfungsi maksimal	Kepala Bidang		3	2	10
		Pencurian komponen perlengkapan jalan	Mitigasi	Pengadaan/Pemasangan CCTV	Jumlah CCTV yang terpasang	Kepala Bidang Prasarana	TW 1, TW 2 dan TW 3			
		Faktor alam, gagal produk dan umur teknis perlengkapan jalan membuat perlengkapan jalan tidak berfungsi dengan baik	Mitigasi	Pemeliharaan perlengkapan jalan : 1. Pemeliharaan LPJU 2. Pemeliharaan Rambu - rambu 3. Pemeliharaan Marka 4. Pemeliharaan ZOSS	Jumlah Perlengkapan jalan terpelihara dan berfungsi maksimal		TW 1, TW 2 dan TW 3			
		Kurangnya kompetensi SDM Pelaksana / Teknisi lapangan	Preventif (Mencegah)	Pelaksanaan Diklat/Bimtek K3	Jumlah SDM berstandart K3		TW 1, TW 2 dan TW 3			
2	Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan bertambahnya angka kecelakaan	Kurangnya penegakan hukum yang berefek jera kepada pelanggar	Mitigasi	Pelaksanaan Abdiyasa	Tertaksananya Abdiyasa	Kepala Bidang Keselamatan	TW 1, TW 2 dan TW 3	3	2	10

		Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam beralu lintas memahami rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	Preventif (Mencegah)	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) dan Pelaksanaan Pelajar Pelopor	Tertindakannya kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) dan Pelaksanaan Pelajar Pelopor		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
		Kurangnya sarana dan prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan yang ada	Preventif (Mencegah)	Cetak Dokumen capaian kinerja per triwulan	Data jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
3	Ketidak taatan pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Mitigasi	Sosialisasi standar operasional PKB	Meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Kepala UPTD PKB	TW 1 , TW 2 dan TW 4	3	2	10
			Preventif (Mencegah)	Belanja Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	Alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
			Preventif (Mencegah)	Belanja pemeliharaan alat uji kendaraan	Alat uji kendaraan bermotor terpelihara dan dalam kondisi baik		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
			Preventif (Mencegah)	Belanja pengadaan alat uji kendaraan	Alat uji kendaraan bermotor tersedia		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
4	Belum optimalnya penataan parkir	Kualitas SDM dan kesejahteraan juru parkir masih cukup rendah	Preventif (Mencegah)	Belanja tenaga jasa kontrak pengatur tempat khusus parkir	Honorarium tenaga kontrak terbayarkan	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	TW 1 , TW 2 , TW 3 dan TW 4	2	2	7
				Belanja tenaga jasa kontrak juru pungut retribusi parkir	Honorarium tenaga kontrak terbayarkan		TW 1 , TW 2 , TW 3 dan TW 4			

				Belanja jasa konversi development integrasi uang elektronik	Jasa konversi development integrasi uang elektronik tersedia		TW 1 , TW 2 dan TW 3			
				Belanja pemeliharaan marka thermoplas	Marka thermoplas terpelihara		TW 1 , TW 2 dan TW 3			
				Belanja aplikasi parkir	Aplikasi parkir tersedia		TW 1 , TW 2 dan TW 3			
				Belanja plang informasi perparkiran	Planginformasi tersedia		TW 1 , TW 2 dan TW 3			
5	Belum tersedianya angkutan umum massal	Anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan pengajuan anggaran	Mitigasi	Pengusulan penambahan anggaran pada TAPD	Anggaran sesuai kebutuhan tersedia	Kepala Bidang Angkutan	TW1	4	1	6
			Mitigasi	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	Kendaraan bermotor tersedia	Kepala Bidang Angkutan	TW 1 , TW 2 dan TW 4			
			Preventif (Mencegah)	Sosialisasi Oto Samarinda	Tersosialisasinya angkutan Bus Oto Samarinda		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
			Preventif (Mencegah)	Jasa survei pelaksanaan operasional Oto Samarinda	Terlaksananya survei operasional Oto Samarinda		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
			Mitigasi	Jasa pengawasan pelaksanaan operasional Oto Samarinda	Terlaksananya pengawasan operasional Oto Samarinda		TW 1 , TW 2 dan TW 4			
6	Dokumen Perencanaan, Dokumen penganggaran, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah tidak memadai	Kurang koordinasi antar OPD dengan Pihak Pemangku	Preventif (Mencegah)	Membuat target dan pengukuran rencana aksi per Triwulan	Capaian kinerja dapat terukur secara berkala per tri wulan	Sekretariat	TW 1 , TW 2, TW 3 dan TW 4	4	1	6
		Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah masih belum maksimal	Preventif (Mencegah)	Belanja makan minum rapat evaluasi capaian kinerja	Terlaksananya rapat evaluasi capaian kinerja pertriwulan	Sekretariat	TW 1 , TW 2, TW 3 dan TW 4			

				Cetak Dokumen capaian kinerja per triwulan	Dokumen capaian kinerja per triwulan tersedia		TW 1 , TW 2, TW 3 dan TW 4			
7	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi mengenai angkutan sungai dan danau	Kurangnya SDM yang pernah diklat / bimtek mengenai angkutan sungai dan danau	Preventif (Mencegah)	Cetak buku laporan	Laporan tersedia	Kepala Bidang Angkutan	TW 4	4	1	6
			Preventif (Mencegah)	Belanja Diklat: 1. Diklat bidang kepelabuhanan dan pelayaran 2. Diklat inspektur marine 3. Diklat LLASDP	Jumlah SDM bidang angkutan sungai dan danau		TW 1 , TW 2, TW 3 dan TW 4			

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan pernyataan risiko

Kolom c diisi dengan respon risiko

Kolom d diisi dengan respon risiko

Kolom e diisi dengan rencana kegiatan pengendalian

Kolom f diisi dengan indikator keluaran (contoh Dokumen, SK, SOP dsb)

Kolom g diisi dengan Penanggung Jawab

Kolom h diisi dengan Target Waktu (Bulanan, Triwulan, Semester)

Kolom i diisi dengan Harapan Kemungkinan setelah ada Pengendalian / RTP

Kolom j diisi dengan Harapan Dampak setelah ada Pengendalian / RTP

Kolom k diisi dengan Harapan Level Risiko setelah ada Pengendalian / RTP

RISK REGISTER
KECURANGAN

REGISTER RISIKO KECURANGAN
Register Risiko Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa dan Narasumber di Dinas Perhubungan

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8*9	11	12
1	Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan	Kecurangan pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan	Kualitas dan kuantitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Perhubungan belum sesuai DPA	Seluruh Bidang	Mark up biaya, penurunan kualitas, pengurangan jumlah kuantitas, tidak sesuai spek	Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	14	Kerugian APBD	- Reviu HPS - Peningkatan Kompetensi SDM tentang PBJ
2	Honor Narasumber	Memfaatkan staf internal di Instansi sebagai narasumber	Kurang Menguasai Materi, Tidak Bersertifikat	Bidang penyelenggara	Kesempatan dan rasionalitas, kurangnya referensi narasumber	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 Tahun 2023: PMK ini mengatur tentang Standar Biaya Masukan (SBM) yang mencakup honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara dalam kegiatan Pemerintah	3	3	14	Kerugian APBD	Memakai SDM yang Bersertifikat

Samarinda, 06 Mei 2025

SEKRETARIS,



Drs. SJAMI MISNAM

NIP. 19681212 198803 1 010

**RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi : Dinas Perhubungan
 Komponen : Identifikasi titik rawan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dan Narasumber
 Waktu Money : 1 Tahun

No (Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi kecurangan)	Jenis Kegiatan Berpotensi (sebutkan jenis kegiatan di instansi Bapak/Ibu yang berpotensi terjadinya kecurangan)	Potensi Terjadinya kecurangan (sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2))	Skenario Kecurangan (uraikan kejadian terjadinya kecurangan)	Faktor Penyebab (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya kecurangan sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi Kecurangan yang telah diidentifikasi)	Probabilitas potensi Kecurangan (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan pada kolom (3) benar-benar terjadi)	Dampak Kerugian (Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya Kecurangan pada kolom (3))	Level Risiko (menggunakan matriks risiko)	Rencana pengendalian yang perlu dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
1	Pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan	Kecurangan pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan	Kualitas dan kuantitas pengadaan barang dan jasa di Dinas Perhubungan belum sesuai DPA	Mark up biaya, penurunan kualitas, pengurangan jumlah kuantitas, tidak sesuai spek	Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	14	Reviu HPS, peningkatan kompetensi SDM tentang PBJ
2	Honor narasumber	Memfaatkan staf internal di Instansi sebagai narasumber	Kurang menguasai materi tidak bersertifikat	Kesempatan dan rasionalitas, kurangnya referensi narasumber	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 Tahun 2023: PMK ini mengatur tentang Standar Biaya Masukan (SBM) yang mencakup honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara dalam kegiatan pemerintah	3	3	14	Memakai SDM yang bersertifikat

KEPALA DINAS

HMT MANALU, S.SiT, M.Sc
 NIP. 19770328 200012 1 001

MITIGASI KECURANGAN

Instansi : Dinas Perhubungan

Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dan Narasumber

Waktu Monev : 1 Tahun

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak Kerugian kecurangan	Level Risiko Kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
1	Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan	Reviu HPS, Peningkatan Kompetensi SDM tentang PBJ	PA, KPA, PPTK	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan mengecek kualitas barang dan kelengkapan administrasi perusahaan serta selalu menjadi perhatian tim pemeriksa Barang dan Jasa	100%	2	2	7	Perlu menyelesaikan seluruh HPS
2	Honor Narasumber	Memakai SDM yang bersertifikat	PA, KPA, PPTK	Pengumpulan referensi perusahaan penyedia narasumber. Pihak narasumber memiliki sertifikat yang sesuai. Tidak memberikan honor narasumber bagi pegawai yang menjadi narasumber	100%	2	2	7	- Mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk tahun yang akan datang - Lebih selektif dalam penyusunan belanja anggaran dalam RKA

KEPALA DINAS,


HMT MANALU, S. SIT, M.Sc
 NIP. 19770328 200012 1 001

